

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Ahmad Zaini, Amrazi Zakso, M. Syukri

Program Studi Administrasi Pendidikan, FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Email: zai_muh1@yahoo.co.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, berkenaan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah 2 Pontianak. MBS adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih ke sekolah-sekolah dan meningkatkan keterlibatan langsung dari masyarakat/komunitas sekolah. Bentuk-bentuk partisipasi komunitas sekolah berupa dukungan moril, finansial maupun materil, dan sistem evaluasi dilakukan atas program pendidikan berdasarkan transparansi dan akuntabel berbentuk laporan. Sub tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui visi dan misi SD Muhammadiyah 2 Pontianak dalam mengimplementasikan MBS; (2) Mengetahui persepsi masyarakat terhadap visi dan misi sekolah pada SD Muhammadiyah 2 Pontianak; (3) Mengetahui partisipasi Masyarakat di bidang perencanaan program sekolah dimaksud; (4) Mengetahui bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program sekolah; (5) Mengetahui partisipasi masyarakat dalam evaluasi program sekolah; dan (6) Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengimplementasian MBS pada SD Muhammadiyah 2 Pontianak.

Kata Kunci: Partisipasi, Masyarakat, MBS, Penyelenggaraan Pendidikan.

Abstract: This study is aimed at describing and analyzing the implementation of School-Based Management (SBM) at Muhammadiyah 2 Pontianak Elementary School. SBM is a model of management that promotes school autonomy and community participation. The school community gives moral, financial, and material supports. Meanwhile, the education program and implementation are conducted and evaluated accountably and transparently. The objectives of this study are: (1) to know the vision and missions of Muhammadiyah 2 Pontianak Elementary School in the implementating SBM; (2) to know the school community perception toward the school's vision and missions; (3) to know the school community participation in planning the school program; (4) to know the forms of the community participation in implementating the school program; (5) to know the community participation in evaluating the school program; and (6) to know the factors that support and inhibit the the community participation in the implementation of School-Based Management (SBM).

Keywords: *Participation, Society, SBM, Education Implementation.*

Terminologi otonomi pendidikan yang terintegrasi menjadi otonomi sekolah dengan dukungan birokrasi yang didesentralisasikan, mengisyaratkan peluang besar pada sekolah untuk lebih berkembang secara maksimal (tanpa kehilangan identitasnya), karena didalamnya mengandung makna partisipasi atau keterlibatan masyarakat melalui komite sekolah. Wujud keterlibatan masyarakat dimaksud, bukan sekedar dalam bentuk finansial, tetapi keterlibatan yang diharapkan adalah lebih dari itu, demi terciptanya peningkatan mutu sekolah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, bahwa partisipasi masyarakat dalam program pendidikan masih terbilang rendah. Partisipasi orang tua/wali peserta didik diketahui hanya sebatas bantuan finansial, dan keterlibatannya pun belum sepenuhnya dalam artian “duduk bersama” dalam membuat dan merumuskan perencanaan sekolah maupun pengembangan program-program pendidikan. Padahal Khan and Khan (dalam Abbott, 1996:74) menegaskan, bahwa *the prospective beneficiaries—small landholders—must participate fully in each stage of the development of a specific program, starting from the articulation of their needs and assessment of their resources*. Oleh karena itu, salah satu indikasi belum sepenuhnya partisipasi masyarakat dimaksud, karena ada anggapan yang menganggap bahwa tanggung jawab pendidikan ada pada pihak sekolah dan pemerintah, sedang orang tua/wali peserta didik cukup mendukung *input* pendidikan melalui pembiayaan yang diwajibkan sekolah. Perihal ini tentunya harus diperbaiki, karena jika tidak diperbaiki maka dikhawatirkan akan semakin menjauhkan sekolah dari lingkungan masyarakatnya, sekaligus memudahkan makna MBS dalam makna sebenarnya.

Esensi MBS adalah otonomi sekolah dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan, menurut David (dalam Levacic, 1995:3) bahwa *School-based management as autonomy plus participatory decision-making, consist of. Increasing school autonomy through some combination of site budgetary control and relief from constraining rules and regulations, and sharing the authority to make decisions with teacher, and some times with parent, student and other community members*.

Agar tujuan sekolah tercapai sebagaimana harapan MBS maka perlu peningkatan kapasitas dan komitmen seluruh warga sekolah, termasuk masyarakat dan orang tua siswa, sehingga kepadanya dapat mendukung pihak sekolah dalam menerapkan MBS. MBS sangat diperlukan pihak SD Muhammadiyah 2 Pontianak, sebagaimana diketahui sejak pertumbuhan dan perkembangannya terus berada di lingkungan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat yang berada dalam wilayah Kota Pontianak. Meskipun menariknya bahwa SD Muhammadiyah 2 Pontianak sejak awal berdirinya telah melaksanakan konsep MBS—manakala dinilai berdasarkan perspektif otonomi sekolah.

Eric Digest (dalam Sagala, 2011:155) menegaskan, bahwa MBS merupakan gagasan yang menempatkan kewenangan pengelolaan sekolah satu keutuhan entitas sistem yang didalamnya terkandung adanya desentralisasi kewenangan yang diberikan kepada sekolah untuk membuat keputusan. Atas pendapat tersebut maka penyelenggaraan pendidikan di SD Muhammadiyah 2 Pontianak berdasarkan konsep MBS, karena memang telah didukung oleh badan pembina

terutama dari segi pembiayaan pendidikannya, selain dukungan dari masyarakat (Badan Pembina, Komite Sekolah, Alumni, orang tua siswa dan simpatisan) terhadap penyelenggaraan pendidikannya. Dukungan masyarakat yang masih terbilang terbatas itu saja, diketahui telah mampu membawa sekolah ini berhasil mencapai prestasi, terutama berkenaan dengan prestasi belajar siswanya.

Prestasi belajar siswa SD Muhammadiyah 2 Pontianak, diantaranya terlihat pada Ujian Akhir/UASBN (Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional) yang menunjukkan hasil memuaskan. Adapun prestasi belajar yang telah dicapai sekolah tersebut, terutama pada hasil Ujian Akhir/UASBN Tahun Pelajaran 2008/2009, Tahun Pelajaran 2009/2010 dan Tahun Pelajaran 2010/2011 sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1 Keadaan Prestasi Belajar Siswa dalam Tiga Tahun Terakhir di SD Muhammadiyah 2 Pontianak

Uraian	Nilai rata-rata
Tahun Pelajaran 2008/2009	8,15
Tahun Pelajaran 2009/2010	8,64
Tahun Pelajaran 2010/2011	8,30
Rata-rata Nilai dalam Tiga Tahun Terakhir	8,36

Sumber: Data SD Muhammadiyah 2 Pontianak, Tahun 2012.

Berdasarkan **Tabel 1** mengenai prestasi SD Muhammadiyah 2 Pontianak tentang hasil belajar siswa pada Ujian Akhir/USBN dalam 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan rata-rata nilai sebesar 8,36 meliputi: (1) Hasil Ujian Akhir Tahun 2008/2009 mencapai nilai rata-rata 8,15 dengan kualifikasi A, sedangkan rata-rata nilai Provinsi Kalimantan Barat mencapai 5,89 dengan kualifikasi C; (2) Hasil Ujian Akhir Tahun 2009/2010 mencapai nilai rata-rata 8,64 termasuk dalam peringkat II se-Kalimantan Barat; dan (3) Hasil Ujian Akhir Tahun 2010/2011 mencapai nilai rata-rata 8,30 termasuk dalam peringkat II se-Kota Pontianak (tidak ada pengumuman peringkat se-Kalimantan Barat).

Kemajuan tentang keberhasilan yang berhasil dicapai SD Muhammadiyah 2 Pontianak secara akademis tersebut, juga terlihat kemajuan pada aspek akademis lainnya seperti pada kegiatan ekstrakurikuler. Berkenaan keberhasilan yang dicapai itu, juga didapati beberapa kelemahan sebagai bentuk kekurangan yang perlu mendapatkan perbaikan, diantaranya masih ada beberapa orang guru—sebagai tenaga pendidik—yang belum berkualifikasi S-1 (Strata Satu). Sebagai gambaran bahwa pada: (1) Tahun Pelajaran 2008/2009 terdapat 30 persen atau 12 orang guru dari 40 orang guru yang belum berkualifikasi S-1; (2) Tahun Pelajaran 2009/2010 terdapat 25 persen atau 10 orang guru dari 40 orang guru yang belum berkualifikasi S-1; dan (3) Tahun Pelajaran 2010/2011 terdapat 10 persen atau 4 orang guru dari 40 orang guru yang belum berkualifikasi S-1.

Persoalan lainnya yang berhasil diketahui bahwa masih terdapat masyarakat khususnya orang tua/wali peserta didik yang mengeluhkan tentang biaya pendidikan berupa iuran maupun biaya masuk sekolah berikut sumbangan lainnya yang terbilang cukup tinggi atau mahal. Meskipun terdapat persoalan tentang mahalnya biaya pendidikan di SD Muhammadiyah 2 Pontianak, ternyata juga tidak menyurutkan animo masyarakat dan dalam hal ini orang tua/wali peserta didik untuk menyekolahkan putra-putrinya di sekolah tersebut. Bahkan keinginan untuk menyekolahkan putra-putrinya di sekolah tersebut dari tahun ke tahun dinilai melebihi daya tampung sekolah.

Atas kondisi demikian sebenarnya dapat dinilai sebagai sesuatu yang ironis, karena di satu sisi terdapat keluhan tentang mahalnya biaya pendidikan di sekolah tersebut, dan disisi lain masih banyaknya animo masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di sekolah tersebut. Salah satu bukti tingginya animo masyarakat terlihat pada pendaftaran sekolah peserta didik di setiap awal tahun ajarannya. Banyak masyarakat selaku orang tua/wali peserta didik yang rela mendaftarkan putra-putrinya sebagai calon murid meskipun waktu pendaftarannya selang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran di buka, dan calon siswa siap mengikuti seleksi masuk sebagaimana yang ditetapkan pihak sekolah.

Berdasarkan realitas yang terjadi di SD Muhammadiyah 2 Pontianak dan berkenaan pelaksanaan MBS di sekolah tersebut, maka dalam penelitian ini berupaya menjawab permasalahan, meliputi: (1) Bagaimanakah visi dan misi SD Muhammadiyah 2 Pontianak dalam mengimplementasikan MBS? (2) Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap visi dan misi sekolah pada SD Muhammadiyah 2 Pontianak? (3) Bagaimanakah partisipasi masyarakat di bidang perencanaan program sekolah pada SD Muhammadiyah 2 Pontianak? (4) Bagaimanakah bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program sekolah pada SD Muhammadiyah 2 Pontianak? (5) Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam evaluasi program sekolah pada SD Muhammadiyah 2 Pontianak? (6) Faktor-faktor pendukung dan penghambat apa saja yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengimplementasian MBS pada SD Muhammadiyah 2 Pontianak?

Miyers dan Stonehill (dalam Nurkolis, 2006:3) mengemukakan bahwa MBS adalah strategi untuk memperbaiki pendidikan melalui transfer otoritas dalam pengambilan keputusan dari pemerintah pusat dan daerah ke sekolah. MBS merupakan bentuk desentralisasi yang menempatkan sekolah sebagai pelaku utama untuk melaksanakan perubahan dan peran serta masyarakat. Sedangkan Caldwell dan Spink (dalam Duhou, 2002:19) mengungkapkan, bahwa MBS adalah suatu bentuk desentralisasi kewenangan yang signifikan dan konsisten ke tingkat sekolah untuk membuat keputusan terkait dengan alokasi sumber daya, meliputi; pengetahuan, teknologi, kekuasaan, materi, manusia, waktu, dan keuangan.

MBS merupakan model pengelolaan sekolah yang menekankan pada otonomi sekolah dan mengoptimalkan partisipasi warga sekolah, yaitu; guru, pegawai tata usaha, komite sekolah dan komunitas sekolah lainnya dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan Wohlstetter dan Mohrman (1994:269) bahwa *School Based Management (SBM) has become a*

popular corner stone of education reform, with states and school districts across the country adopting policies that decentralize management to improve the performance of educational system. Brown (dalam Duhou, 2002:100) secara spesifik juga mengungkapkan, bahwa terdapat 6 (enam) ciri MBS yang efektif, meliputi: (1) Otonomi; (2) Perencanaan yang melibatkan masyarakat; (3) Penggunaan peran baru oleh kepala sekolah; (4) Lingkungan sekolah yang partisipatif; (5) kerjasama; dan (6) Tuntutan lebih besar terhadap efektivitas personal kepala sekolah dan guru. Tujuan MBS menurut Danim (2008:18) adalah pemberdayaan sekolah, meski sifatnya sebatas masa transisi. Oleh Zabadi (dalam Emzir, 2010:3) menambahkan, bahwa MBS bertujuan untuk memandirikan atau membudayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, keluwesan dan sumberdaya untuk meningkatkan mutu sekolah.

MBS perlu diimplementasikan, terutama menyangkut tentang pertanggungjawaban sekolah yang tidak hanya bersifat teknis edukatif pada pelaksanaan program sesuai petunjuk dan pedoman dari pusat, namun lebih dari itu bahwa yang terpenting juga adalah pertanggungjawaban sekolah terhadap masyarakat—khususnya orang tua/wali peserta didik—sehubungan pengelolaan administrasi keuangan. Hal ini mengingatkan pada pendapat Komara (2008:1) bahwa secara esensial MBS menawarkan diskursus ketika sekolah tampil secara relatif otonom dengan tidak mereduksi peran pemerintah, terutama dalam bidang pendanaan.

Atas dasar itu maka Danim (2008:7) menegaskan, bahwa masalah aplikasi MBS bagi peningkatan kinerja sekolah dan perbaikan mutu hasil belajar peserta didik pada sekolah-sekolah yang menerapkannya masih harus diuji di lapangan. Mengenai peran MBS menurut Wohlstetter dan Mohrman (1994:165) mengemukakan, *the mechanism for bringing this capacity to bear on school-level decisions is most often a school-site council that consist of some combination of the principal, teachers, student, parent, and the community.* Mengingat implementasi MBS merupakan langkah strategis yang didalamnya mengandung unsur partisipasi masyarakat, sehingga dalam menerapkan seluruh langkah-langkah sudah dijabarkan dalam pemikiran sebelumnya. Demi terwujudnya pelaksanaan MBS sesuai dengan harapan, karena kesalahan dalam implementasi MBS akan sangat merugikan keberadaan sekolah dimasyarakat.

Astuti (2012) menilai bahwa partisipasi masyarakat secara total merupakan prasyarat untuk meningkatkan mutu sekolah. Oleh karena itu, wajarlah manakala Astuti (2012) kembali mengemukakan, bahwa partisipasi edukatif perlu didesain sesuai kondisi dan potensi siswa, orang tua dan keluarga sebagai pedoman untuk mendorong keterlibatan anggota keluarga dalam proses pendidikan anak. Salah satu wujud konkrit secara formal yang diimplementasikan adalah dibentuknya komite sekolah. Hadirnya komite sekolah sebagai salah satu wujud implementasi MBS akan memberikan peran penting kepada warga sekolah dan masyarakat agar berperan lebih aktif maka perlu strategi dan pemahaman, serta masyarakat dapat menyadari bahwa keberadaanya merupakan bagian integral dari sekolah.

METODE

Dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mencermati secara mendalam tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2012:4) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Sedangkan Kirt dan Miler (dalam Moleong, 2012:4) mengemukakan, bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dan kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di SD Muhammadiyah 2 Pontianak dari bulan Maret sampai dengan bulan Oktober 2012. Subyek dalam penelitian ini adalah warga sekolah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti yang terdiri dari unsur pimpinan sekolah, ketua komite sekolah, dewan guru, penyelenggara sekolah dari unsur Dikdasmen, staf sekolah, orang tua alumni dan masyarakat yang memiliki kepedulian atas penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut.

Sumber data tersebut ditentukan secara *purposive*. Sugiyono (2009:53) mengungkapkan, bahwa *purposive sampling* adalah tehnik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Namun jika sumber data penentuan sumber data secara *purposive* tidak memuaskan maka akan digunakan *snowball sampling*. Bogdan dan Biklen (2007:72) mengatakan, bahwa *snowball sampling technique that is, he asked the first person he interviewed to recommend others. He interviewed the second in a similar open-ended manner, withholding the theory he developed on the basis of this first interview.*

Pada penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri dengan seluruh kepribadiannya. Menurut Sugiyono (2009:59), peneliti kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (1992:16) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sedangkan untuk memperoleh keabsahan data, sesuai dengan pendapat Suryana (2011:10) yang dilakukan dengan cara: (1) Uji kredibilitas, dilakukan dengan melakukan pengamatan secara terus-menerus, triangulasi dan berdiskusi dengan teman sejawat; (2) Uji transferabilitas, dilakukan dengan melihat faktor kemiripan sebagai kemungkinan terhadap situasi-situasi yang berbeda dengan tingkat *transferability* yang memadai; (3) Uji dependabilitas, dilakukan dengan pemeriksaan data yang sudah dipolakan, terutama terhadap data hasil wawancara mendalam dan dibandingkan dengan dokumen yang ada memiliki kesamaan; dan (4) Uji Konfirmabilitas, dilakukan dengan cara membicarakan hasil temuan penelitian kepada orang lain yang tidak

ikut dan tidak berkepentingan dalam penelitian dengan tujuan agar hasil yang didapat lebih obyektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Visi SD Muhammadiyah 2 Pontianak adalah menjadikan atau mewujudkan: "Berakhlak Mulia, Unggul dalam Prestasi, Terampil, Disiplin, serta Berwawasan Lingkungan." Sedangkan rumusan misi SD Muhammadiyah 2 Pontianak adalah: (1) Meningkatkan penerapan akhlak mulia di sekolah, di rumah dan masyarakat; (2) Meningkatkan pelaksanaan kualitas ke-Islaman; (3) Mengembangkan wawasan lingkungan sekitar; (4) Mampu berkompetisi dalam keilmuan dan keterampilan teknologi; dan (5) Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan serta memberdayakan semua komponen pendidikan secara maksimal.

Berdasarkan visi dan misi Sekolah Dasar Muhammadiyah 2 Pontianak tersebut, diketahui sejak berdiri pada 1 Januari 1975 lalu bahkan kini telah mendapat predikat "Akreditasi A" SD Muhammadiyah 2 Pontianak. Keberhasilan itu dikarenakan kepala sekolah dianggap memiliki kemampuan menanamkannya kepada seluruh *stakeholders* pendidikan di sekolah tersebut. Sejalan diimplementasikannya MBS di Sekolah dasar Muhammadiyah 2 Pontianak, menjadikan peluang sekolah ini mendapatkan masukan dari berbagai pihak, dan itu sangat diperlukan dalam rangka menyempurnakan dan peningkatan *ownership*. Umpan balik dari berbagai pihak tersebut dinilai sangat penting, karena keberadaan masyarakat selaku orang tua/wali peserta didik sebagai *resource center*, dianggap lebih mengetahui dan mengerti jalan panjang yang akan ditempuh, sehingga daripadanya akan muncul berbagai masukan yang cemerlang *nota bene* belum terpikirkan oleh para perancang visi di sekolah tersebut, guna dijadikan milik bersama untuk merealisasikan untuk keberhasilannya.

Umumnya masyarakat berpersepsi atau menaruh kepercayaan dan penilaian positif terhadap SD Muhammadiyah 2 Pontianak. Hal ini sekiranya memberikan isyarat bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat—khususnya orang tua/wali peserta didik—lebih banyak menekankan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terkait dengan sekolah tersebut. Di sisi lain isyarat tersebut tersebut menggambarkan bahwa persepsi masyarakat tentang visi dan misi sekolah dalam pelaksanaan berhubungan dengan masyarakat, dan itu sifatnya tidak menunggu adanya permintaan masyarakat, tetapi sekolah berusaha secara aktif, serta mengambil inisiatif untuk melakukan berbagai aktivitas sehingga tercipta hubungan dan kerjasama harmonis.

Atas kepercayaan masyarakat tersebut maka Kepala SD Muhammadiyah 2 Pontianak mengaku, pihaknya akan terus membangun hubungan secara intensif dengan masyarakat untuk keberhasilan visi dan misi secara paripurna, baik dalam arti sasaran masyarakat/orang tua atau wali peserta didik yang dapat diajak kerjasama maupun sasaran hasil yang diinginkan, sehingga beberapa prinsip-prinsip penyelenggaraan sekolah terus menjadi pertimbangan dan perhatian. Beberapa prinsip yang diakui terus menjadi perhatian dalam pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat, meliputi: (1) Semua kegiatan hubungan

sekolah dengan masyarakat perlu semakin dilaksanakan secara integral atau terpadu; (2) Pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat perlu ditingkatkan dan selayaknya dilakukan secara terus menerus; (3) Kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat, misalnya program ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler, remedial *teaching* dan lain-lain kegiatan; (4) Agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat terjalin baik maka perlu dilakukan intensivitas komunikasi personal maupun komunikasi kelompok, dimana pihak pemberi informasi (sekolah) dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat; (5) Program hubungan sekolah dengan masyarakat akan terus diupayakan sekonstruktif mungkin, bahwa dalam pengertian sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat; dan (6) Program hubungan sekolah dengan masyarakat selalu diupayakan disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat/orang tua murid.

Setiap sekolah tentunya mempunyai orientasi untuk meningkatkan kualitas sekolahnya. Kualitas sekolah dan *output* pendidikan yang telah raih dan dihasilkan SD Muhammadiyah Pontianak akan semakin menjadikan sekolah ini ternama di Kota Pontianak bahkan Kalimantan Barat. Kemajuan yang telah diraih sekolah ini diantaranya karena selalu cermat dalam membangun atau merumuskan perencanaan yang baik—bersifat partisipatif. Agar tingkat keterlibatan masyarakat terus terjaga maka Kepala SD Muhammadiyah 2 Pontianak menilai perlu disediakan arenanya. Salah satu arena yang tepat adalah rapat kerja (Raker) dengan agenda tunggal perumusan rencana. Langkah-Langkah Perumusan Operasional Rencana Sekolah, yaitu: (1) Identifikasi masalah, seperti persoalan PBM, peserta didik, keuangan dan hubungan masyarakat; (2) Identifikasi alternatif penyebab; (3) Identifikasi alternatif pemecahan masalah; (4) Identifikasi faktor pendukung; (5) Identifikasi faktor penghambat; dan (6) Penentuan alternatif terpilih.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan mengenai perencanaan program sekolah pada SD Muhammadiyah 2 Pontianak yang melibatkan partisipasi masyarakat sehubungan MBS secara *bottom-up* dan melibatkan seluruh komponen sekolah, komite sekolah serta *stakeholders* sekolah yang lainnya dengan mengedepankan prinsip MBS, meliputi: Otonomi sekolah, fleksibilitas, partisipasi dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran mutu sekolah.

Kepala SD Muhammadiyah 2 Pontianak menegaskan bahwa setidaknya terdapat 4 (empat) kewenangan—*otonomi*—dan 3 (tiga) prasyarat yang bersifat organisasional yang wajib dimiliki sekolah dalam mengimplementasikan MBS, meliputi: (1) Kekuasaan untuk mengambil keputusan; (2) Pengetahuan dan keterampilan, termasuk untuk mengambil keputusan yang baik dan pengelolaan secara profesional; (3) Informasi yang diperlukan oleh sekolah untuk mengambil keputusan; (4) Penghargaan atas prestasi—*reward*; (5) Panduan instruksional—pembelajaran—seperti rumusan visi dan misi sekolah yang menfokuskan pada peningkatan mutu pembelajaran; (6) Kepemimpinan yang mengupayakan kekompakan dan fokus pada upaya perbaikan atau perubahan; dan (7) Sumber daya yang mendukung.

Secara spesifik bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat—komite sekolah—dalam pelaksanaan program SD Muhammadiyah 2 Pontianak, meliputi: (1) Peran serta dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia; (2) Peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga; (3) Peran serta secara pasif; (4) Peran serta melalui adanya konsultasi; (5) Peran serta dalam pelayanan; (6) Peran serta sebagai pelaksana kegiatan; (7) Peran serta dalam pengambilan keputusan.

Pembahasan

Didasarkan atas bentuk-bentuk partisipasi masyarakat terhadap program SD Muhammadiyah 2 Pontianak tersebut, dapat diyakini sebagai bagian terpenting atau indikator pendukung bagi keberhasilan MBS di sekolah tersebut, dan bila spesifikasi lagi maka keberhasilan yang diraih sehingga menjadi sekolah dasar yang dinilai ternama di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat umumnya, karena tidak terlepas juga dari kepemimpinan kepala sekolah yang profesional dan mampu berlaku secara efektif dan efisien, serta berkemampuan dalam menciptakan iklim organisasi di sekolah yang kondusif untuk proses pembelajaran. Selain itu juga didukung oleh kondisi sosial, ekonomi, dan apresiasi masyarakat terhadap pendidikan. Sedangkan secara eksternal yang dinilai turut menentukan keberhasilan MBS di SD Muhammadiyah 2 Pontianak adalah kondisi tingkat pendidikan orang tua peserta didik dan masyarakat, kemampuan dalam membiayai pendidikan, serta tingkat apresiasi dalam mendorong anak untuk terus belajar. Dukungan pemerintah juga tidak bisa diabaikan berkenaan hal ini karena efektivitas implementasi MBS, meskipun dalam konteks pendanaan sekolah ini diketahui telah mandiri dan terbebas dari segala bentuk-bentuk bantuan finansial dari pemerintah. Maknanya bahwa tanpa profesionalisme kepala sekolah, guru, pengawas, dan tenaga kependidikan lain akan sulit dicapai pembelajaran yang bermutu serta prestasi peserta didik di sekolah tersebut.

Diketahui bahwa tata hubungan antara komite sekolah dengan satuan pendidikan dan institusi lain yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pendidikan bersifat koordinatif Surat Keputusan Mendiknas RI Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Upaya pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam evaluasi program sekolah, sebagaimana penelitian yang dilaksanakan di SD Muhammadiyah 2 Pontianak, melalui komite sekolah diharapkan dapat membina jalinan kerja sama dengan orang tua dan masyarakat. Evaluasi program sekolah yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah bagian dari konsep MBS, sekaligus merupakan bentuk manajemen partisipatif, sehingga semua kebijakan dan keputusan yang diambil adalah kebijakan dan keputusan bersama untuk mencapai tujuan pendidikan bersama.

Evaluasi tentang implementasi program SD Muhammadiyah 2 Pontianak biasanya diwujudkan dalam bentuk laporan rencana dan program pelaksanaan. Laporan ini dibuat secara periodik—setiap tengah semester dan semester—berdasarkan rencana dan program kerja yang telah disusun sebelumnya. Laporan yang dibuat sekolah terdiri atas laporan kemajuan setiap setengah semester atau

semester, dan laporan akhir yang disiapkan setelah tahun pelajaran berakhir. Laporan pada akhir tahun pelajaran merupakan laporan lengkap tentang seluruh rencana dan program kerja yang telah dilaksanakan selama satu tahun serta hasil-hasil yang telah dicapai dengan disertai bukti/dokumen (jika ada), seperti; peningkatan skor ulangan harian akhir, piagam, atau surat keterangan lainnya. Laporan tersebut nantinya akan divalidasi oleh tim penilai untuk mengetahui kebenarannya dan dijadikan dasar dalam menentukan tindakan selanjutnya. Secara garis besar, bahwa laporan akhir tahun pelajaran pelaksanaan rencana dan program pelaksanaan mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) Pencapaian sasaran mutu yang telah ditetapkan; (2) Pelaksanaan program; (3) Kendala selama pelaksanaan; (4) Anggaran dan sisa dana; (5) Dampak pelaksanaan program; dan (6) Simpulan dan saran.

MBS bukan satu-satu alternatif pemecahan masalah di sekolah yang dapat mendongkrak kualitas pendidikan, karena terdapat faktor lain yang ikut berkontribusi didalamnya, seperti; tingkat ekonomi masyarakat—khususnya orang tua/wali murid, kondisi sosial budaya sekolah dan taraf pendidikan masyarakat, kebijakan pemerintah, organisasi atau kepemimpinan kepala sekolah, strategi pembelajaran di kelas, tata laksana sekolah, profesionalisme tenaga guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Partisipasi masyarakat dalam pengimplementasian MBS di SD Muhammadiyah 2 Pontianak—khususnya secara ekonomis—dari orang tua/wali peserta didik sebagai faktor dominan yang tidak bisa diabaikan, sehingga sekolah ini menjadi sekolah tingkat dasar yang cukup ternama di Kalimantan Barat. Sedangkan faktor pendukung lainnya dalam pelaksanaan MBS dalam peningkatan mutu pendidikan adalah kepemimpinan kepala sekolah yang demokratis, pengelolaan manajemen secara transparansi, akuntabilitas, transparan dan otonomi sekolah. Faktor pendukung selanjutnya adalah jumlah guru sudah memadai, dan 75 persen guru sudah berkualifikasi S1. Keinginan dan kemauan kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang besar. Dalam membuat suatu kebijakan, kepala sekolah selalu bersama-sama dengan warga sekolah semua keputusan yang diambil merupakan hasil keputusan bersama. Kepala sekolah menjadikan komunitas sekolah sebagai mitra kerja serta aktif dalam mengembangkan sekolah.

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan MBS dalam peningkatan mutu pendidikan di SD Muhammadiyah 2 Pontianak, diketahui belum semua guru dapat menjalankan kebijakan sekolah terutama pada pengelolaan pembelajaran dan penilaian pembelajaran hal tersebut, dikarenakan pemahaman tentang pengelolaan pembelajaran dan pengelolaan sekolah masih terbatas pada pelaksanaan kewajiban, ditambah keberadaan orang tua murid yang masih terbelang enggan memberikan bantuan berupa dana untuk sekolah.

Faktor penghambat lainnya yang berhasil dihipunkan bahwa masih ada juga guru yang belum sepenuh hati dalam melaksanakan tugas seperti yang sudah direncanakan. Guru terlihat masih ragu-ragu untuk melaksanakan kebijakan kepala sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan karena keterbatasan sarana dan prasarana sekolah yang belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan atas rasio jumlah murid. Belum lagi perihal kesibukan anggota komite sekolah

sehingga program peningkatan mutu sekolah dan pembelajaran, sebagaimana harapan dalam MBS belum optimal sebagaimana mestinya dalam jalinan komunikasi efektif antara sekolah, orang tua dan masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Visi dan misi SD Muhammadiyah 2 Pontianak berkenaan MBS telah terimplementasi dengan baik. Apalagi dalam pelaksanaannya diperkuat dengan spirit dakwah Islamiyah *amar makruf nahi munkar* sehingga semakin mendapat dukungan masyarakat, selain pelaksanaan prinsip keterbukaan dan kebersamaan dalam mencapai tujuan lembaga pendidikan.

Persepsi masyarakat terhadap visi dan misi SD Muhammadiyah 2 Pontianak cenderung positif, sehingga memuluskan peningkatan prestasi akademis maupun non akademis murid. Kepercayaan masyarakat dapat diraih karena kemampuan pihak sekolah berhasil merangkul komunitas sekolah, meliputi; kepala sekolah, guru, staf administrasi, komite sekolah, orang tua/wali murid, alumni dan *stakeholders* lainnya yang memiliki kepedulian untuk bahu-membahu mencapai tujuan dan meningkatkan sekolah kearah prestasi yang lebih baik di bidang pendidikan dasar.

Dalam bidang perencanaan Sekolah Dasar Muhammadiyah 2 Pontianak cenderung menggunakan pendekatan partisipatif masyarakat, sehingga lebih memberikan perluasan aspirasi masyarakat sebagai komunitas sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, staf administrasi, komite sekolah, orang tua/wali murid, alumni dan *stakeholders* lainnya. Kemajuan yang semakin pesat diraih sekolah ini diantaranya karena selalu cermat dalam membangun atau merumuskan perencanaan yang baik, yaitu selalu mengedepankan sistem perencanaan sekolah partisipatif.

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program SD Muhammadiyah 2 Pontianak, berupa keterlibatan anggota komunitas sekolah dalam pengambilan keputusan, baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan program sekolah sampai evaluasi program sekolah.

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi program SD Muhammadiyah 2 Pontianak, diketahui dari besarnya kepedulian komunitas sekolah untuk secara transparan melaporkan setiap perkembangan dan keberhasilan rencana dan implementasi program di setiap tahunnya. Terutama laporan mengenai peningkatan prestasi akademis dan non akademis, serta akhlak siswa, pemerataan dan peningkatan akses serta peningkatan mutu dan tata layanan pendidikan berikut penganggarannya.

Diterapkannya MBS secara konsisten, kondisi sosial-ekonomi dan pendidikan orang tua/wali peserta didik yang memadai, profesionalisme kepala sekolah dan dewan guru berkenaan implementasi MBS di SD Muhammadiyah 2 Pontianak, tidak terlepas dari beberapa faktor penghambat, berupa: Minimnya waktu bagi komite sekolah untuk memikirkan perkembangan sekolah karena kesibukan aktivitas kerja kesehariannya, Terdapat diantara orang tua/wali murid yang enggan untuk berkontribusi secara moril dan materil. Selain itu, hambatan

secara internal bahwa masih terdapat guru yang kurang memiliki loyalitas dan dedikasi dalam pengabdianya.

Saran

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di SD Muhammadiyah 2 Pontianak harus lebih didasarkan pada kesamaan visi, misi dan tujuan sekolah, sehingga pihak sekolah direkomendasikan selalu menempatkan masyarakat selaku orang tua/wali murid sebagai *resource center* dalam rangka keberhasilan implementasi MBS. Mengingat pihak sekolah perlu terus menumbuhkan dan memelihara tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan putra-putrinya. Oleh karena itu, melalui peningkatan program layanan belajar akan dicapai peningkatan prestasi akademis dan non akademis.

Persepsi masyarakat harus dibangun bahwa setiap unsur yang tergabung dalam komunitas sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, staf administrasi, komite sekolah, orang tua/wali murid, alumni dan *stakeholders* lainnya. Kehadiran komunitas sekolah diketahui memiliki hubungan kausalitas dan bersistem, sehingga direkomendasikan kepada komite sekolah harus terus menjadi bagian terpenting, demi keberhasilan MBS dan meningkatkan partisipasi dari semua pihak dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan sekolah.

Setiap unsur yang ada dalam komunitas sekolah disarankan dapat meningkatkan rasa keterbukaan dan kesahajaan, melalui *sharing* pendapat dalam beberapa kegiatan pertemuan yang difasilitasi pihak sekolah, sehingga direkomendasikan kepada segenap orang tua/wali murid dapat secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan pihak sekolah. Harapan yang dicapai melalui kegiatan yang dilaksanakan sekolah tersebut akan lahir gagasan dan ide-ide konstruktif yang disampaikan orang tua/wali murid, demi lahirnya perencanaan program sekolah yang benar-benar didasarkan atas aspirasi masyarakat, dan terpenuhinya kepentingan sekolah yang didasarkan tercapainya tujuan MBS.

Keberhasilan sekolah dalam mengimplementasikan program kerjanya diketahui tidak terlepas dari dukungan segenap unsur yang tergabung dalam komunitas sekolah. Agar hal tersebut dapat terus tercipta maka perlu strategi *rescheduling*, *restructuring* dan *injeksi* sehingga perkembangan MBS berikut hasil-hasil dan kendalanya dapat terpantau dan diselesaikan secara baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Abbott, John. 1996. *Community Participation In Urban Management*. London: Earthscan Publication.
- Astuti, D. Siti Irene. 2012. Partisipasi Masyarakat dalam Desentralisasi Pendidikan: Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Partisipasi Orang Tua dalam Peningkatan Mutu Pada Satuan Pendidikan. (Experiment/Research). Fakultas Ilmu Pendidikan>Filsafat Sosiologi dan Pendidikan. [http:// Siti_Irene_Astuti_D.pdf. wordpress. com](http://Siti_Irene_Astuti_D.pdf.wordpress.com). Diakses pada 20 Agustus 2012.

- Bogdan C. Robert dan Sari Knopp Biklen. 2007. *Qualitative Research For Education An Introduction To Theories and Method*. Boston: Syracuse University, Pearson.
- Danim, Sudarwan. 2008. *Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokrasi Ke Lembaga Akademik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Duhou A. Ibtisam. 2002. *School Based Management*. Alih Bahasa Noryamin Aini, Suparto dan Abas Al-Jauhari. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Emzir, Chan M. Sam (ed). 2010. *Isu-isu Kritis Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Komara, Endang. 2008. *Peran Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Manajemen Mutu Terpadu*. <http://khoirulanwari.wordpress.com/about/peran-manajemen-berbasis-sekolah-dalam-meningkatkan-manajemen-mutu-terpadu>. Diakses pada 2 Februari 2012.
- Levacic, Rosalind. 1995. *Local Management of School Analysis and Practice*. Buckingham: Open University Press.
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Alih Bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press.
- Nurkholis. 2006. *Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model dan Aplikasi*. Jakarta: Grasindo.
- Sagala, Syaiful. 2011. *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Keputusan Mendiknas RI Nomor 044/U/2002 *tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Jakarta.
- Suryana, Asep. 2011. *Tahap-tahap Penelitian Kualitatif*. Bandung: UPI.
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Klong Klede Putra.
- Wohlsetter, Priscilla and Susan Albers Mohrman. 1994. *School-Based Management; Organizing for High Performance*. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers.